SMART CITY: ETNOGRAFI KAWASAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Muhammad Dian Muhafids

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

SMART CITY: ETNOGRAFI KAWASAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Muhammad Dian Muhafids

Permukiman kumuh adalah fenomena perkotaan dan semakin meningkat dari hari ke hari dan menjadi masalah perkotaan itu adalah hasil dari sistem pembangunan berorientasi kota di negara berkembang. Beberapa kondisi kawasan kumuh yang ada di pesisir kota Bandar Lampung adalah Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan. Pembangunan *Smart City* bertujuan menciptakan ekosistem kota yang layak dan nyaman dengan memenuhi prinsip-prinsip yang mengedepankan pelayanan, pemberdayaan, dan kenyamanan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan etnografi yang mana peneliti secara langsung ikut menjadi bagian dari masyarakat guna mengumpulkan data untuk mengetahui dan melihat bagaimana kehidupan kemiskinan yang terjadi di kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Belum ada kebijakan dan program dari smart city yang dibuat khusus untuk mengatasi masalah kemiskinan dan permukiman kumuh. Bentuk rekayasa sosial merupakan kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung di kawasan kumuh.

Kata Kunci :smart city, kumuh, etnografi, kemiskinan

ABSTRACT

SMART CITY: ETHNOGRAPHY OF THE SLUM IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

BY

Muhammad Dian Muhafids

Slums are an urban phenomenon that are increasing day by day and becoming an urban problem that is the result of the city-oriented development system in developing countries. Some of the slums in the coastal city of Bandar Lampung are Kangkung Village and Way Tataan Village. The development of smart cities aims to create a decent and comfortable city ecosystem by fulfilling the principles that promote sustainable community service, empowerment, and comfort. The approach used by researchers is an ethnographic approach in which researchers directly participate as part of the community to collect data and find out how poverty lives in the slums of Bandar Lampung City. There are no policies and programs in smart cities that have been made specifically to address the problem of poverty and slum settlements. This form of social engineering is a general policy carried out by the Bandar Lampung city government in slum areas.

Keywords:smart city, slum, ethnography, poverty

iv

Judul Skripsi	:***Smart City*: Etnografi Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung**
Nama Mahasiswa	: **Muhammad Dian Muhafids**
No Pokok Mahasiswa	: **181011031**
Program Studi	: **Sosiologi**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Aziz Amriwan, S.Sos., M.Si.
NIP. 19850717 201903 1 014

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

v

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Aziz Amriwan, S.Sos., M.Si.** .....

Penguji Utama: **Drs. Usman Raidar, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Desember 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung,15 Febuari 2023
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Dian Muhafids
NPM 1816011031

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Dian Muhafids yang lahir di Gisting tanggal 24 Juni tahun 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Saiful Jamil dan Ibu Indah Wahyuni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis tinggal di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Adapun Riwayat Pendidikan, penulis menempuh Pendidikan formal dengan beberapa jenjang yakni :

1. Madrasah Ibtidaiyah Mathla'ul Anwar Landbaw lulus pada 2012

2. SMP Muhammadiyah 1 Gisting lulus pada tahun 2015

3. SMA Muhammadiyah 1 Gisting lulus pada tahun 2018

Pada bulan Agustus 2018 lalu penulis diterima di Universitas Lampung di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN. Penulis aktif dalam berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi pada tahun 2021.

MOTTO

“Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya.”

(Pramoedya Ananta Toer)

“You may delay, but time will not.”

(Benjamin Franklin)

“When one door is closed, don't you know that many more are open”

(Bob Marley)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mempersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cintadan kasih sayang kepada :

Kedua Orang Tua

BAPAK DAN MAMAK

Terimakasih atas segala cinta, do'a dan kasih sayang yang selalu dicurahkan. Dengan memiliki kalian, Saya anak yang paling beruntung di dunia.

Adik-adikku Tersayang

Terimakasih kepada adikku Fadhilatul Rahmat Algifari dan Galih Prayofa yang telah menjadi motivasi utama mamas untuk sukses.

Dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung

Terimakasih untuk segala kepercayaan serta pengalaman- pengalaman berharga yang diberikan. Saya selalu merasa beruntung hadir di tengah anda sekalian.

Almamaterku

Keluarga Besar Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "SMART CITY: Etnografi Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung" yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dari baik materi pembahasan maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca yang baik guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini diantaranya:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmuNya sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu, tentu saja dengan seizin Allah SWT.
2. Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung.
3. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Ibu Dr.Bartoven Vivit Nurdin,M.Si selaku Ketua Jurusan yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam pengerjaan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membatu dan memberikan arahan.

6. Bapak Aziz Amriwan, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia membantu penulis untuk di melakukan bimbingan.
7. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si selaku Dosen Pembahas yang selalu memotivasi penulis dan memberikan saran yang baik dalam menulis skripsi.
8. Mas Edi yang selalu sabar melayani mahasiswa dan selalumemberikan *best service* walaupun terkadang mahasiswa nyebelin.
9. Keluarga besar Bappeda Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis sampai pada tahap ini dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis selamamelakukan riset dan magang.
10. Keluarga besar *Sudarto's Family* dan *Masirah's Family* yang telah banyak memberikan dukungan, do'a dan motivasi.
11. *Gisting Squad* a.k.a Angelo Geng yang selalu menemani dan memberikan keceriaan baik di saat senang maupun susah, Semoga kita sukses semua minimal jadi PNS.
12. Keluarga Besar Mahasiswa Kampang (Kemakam) terutama wakgeng nya Bapak Wahyu Umpu Dalom S.Sos, hampir M.Si, yang memotivasi penulis dalam hal bergaul dan bersosial.
13. Kiyay Wahyu Ardhi dan *Oke Squad* yang sudah memberikan banyak *side job* projek alakadarnya sehingga membantu penulis untuk bisa bertahan hidup di rantau, Semoga kedepanya kita semua sukses bisa jadi pengusaha basar.
14. Keluarga besar HMJ Sosiologi khususnya kabinet Praptama Abhinaya, terimakasih kesempatannya telah memberikan banyak pengalaman berorganisasi kepada penulis.
15. Sahabatku Fasha, Kemal, Fadel, Rasyid, Nci, Pia, Sindi dkk terimaksih banyak sudah menemani masa masa kuliah dan selalu bersedia untuk di tanya-tanya dan repotkan.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
RIWAYAT HIDUP ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
SANWACANA ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Teori Etnografi 7
2.2 Teori Kemiskinan 8
2.2.1 Bentuk Kemiskinan 11
2.2.2 Jenis Kemiskinan 15
2.3 Pemukiman Kumuh 16
2.3.1 Faktor Terbentukmya Pemukiman Kumuh 16
2.3.2 Masalah Akibat Pemukiman Kumuh 17
2.3.3 Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh 19
2.4 *Smart City* 20
2.4.1 Indikator *Smart City* 22
2.4.2 Unsur dan Faktor-Faktor *Smart City* 24
2.5 Penelitian Terdahulu 25

BAB III METODE PENELITIAN **31**
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Lokasi Penelitian 32
3.3 Informan Penelitian 32
3.4 Jenis dan Sumber Data 33
3.4.1 Jenis Data 33
3.4.2 Sumber Data 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Teknik Analisa Data 34
3.7 Teknik Keabsahan Data 35

BAB IV *SETTING* PENELITIAN 37
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Bandar Lampung 37
4.1.1 Visi dan Misi Kota Bandar Lampung 38
4.1.2 Keadaan Fisik Wilayah Kota Bandar Lampung 39
4.1.3 Keadaan Penduduk WilayahKota Bandar Lampung 40
4.1.4 Profil Kemiskinan Kota Bandar Lampung 41
4.1.5 Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Selatan 43

I.PENDAHULUAN

I.1Latar Belakang Masalah

Keberadaankota terus berubah dan mengalami perkembangan yang sangat signifikan serta membawa pengaruh yang besar dalam pola hidup dan peradaban manusia. Namun demikian, semakin cepat dan besar pertumbuhan sebuah kota, maka cenderung semakin besar pula masalah yang muncul terhadap kota tersebut. Saat ini, lebih dari 3,9 miliar orang yang merupakan lebih dari 54% populasi global tinggal di kota. Hal ini memunculkan permasalahan yang sangat kompleks di daerah perkotaan seperti pertumbuhan penduduk, masalah lingkungan, kawasan kumuh, kemacetan, kemiskinan, kriminalitas dan sebagainya. Bahkan, urbanisasi diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Meningkatkan populasi perkotaan menjadi 6,0 miliar pada tahun 2045.

Menurut UNDP, di Indonesia sendiri lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dengan tingkat urbanisasi saat ini 2,3%. Bahkan di perkirakan pada tahun 2030 ada sekitar 73% orang Indonesia akan tinggal di perkotaan. Hal ini menyebabkan angka kemiskinan di perkotaan diproyeksikan melampaui kemiskinan di pedesaan terutama karena urbanisasi dan perluasan kota. Bandar Lampung yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan memiliki populasi penduduk 1.015.910 jiwa.Dimana hal tersebut sudah memenuhi salah satu syarat menjadi kota metropolitan. Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan dan dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1 juta jiwa.

Pertumbuhan pendidikan yang tinggi dan perkembangan kota yang pesat di daerah perkotaanakibat banyaknya orang yang pindah ke daerah perkotaan seringkali

tidak dapat diakomodasi secara memadai dan melampaui kemampuan otoritas kota untuk menyediakan berbagai infrastruktur penunjang yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan terciptanya bentuk-bentuk kemiskinan baru. Daerah perkotaan cenderung memiliki biaya hidup yang tinggi, masalah perumahan semakin memperparah menyebabkan munculnya daerah kumuh sebagai tempat tinggal bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya sewa yang tinggi atau membeli rumah di daerah perkotaan.

Berdasarkan survei awal dari parameter fisik bangunan, lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung tersebut memiliki korelasi, tingkat kerapatan bangunan, ketidakteraturan pola kavling, dimensi kavling yang jauh dibawah standar, mata pencaharian yang didominasi oleh sektor non formal menjadi salah satu gambaran kondisi kawasan tersebut. Selain itu, masyarakat kumuh di Kota Bandar Lampung memiliki kebiasaan buruk.Dimana mayoritas masyarakat membuang sampah pada bantaran sungai. Hal ini menyebabkan kawasan tersebut terlihat kumuh. Faktor-faktor lain yang menyebabkan kawasan menjadi kumuh seperti saluran drainase yang buruk, sanitasi dan kondisi jalan lingkungan yang kurang memadai.

Di Kota Bandar Lampung sendiri lahan seluas 4365,23 Ha merupakan suatu lokasi kumuh. Dimana timbulnya kawasan kumuh tersebut disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat. Namun, bias sosial, adat istiadat, dan kondisi umum kesejahteraan juga dapat berkontribusi pada munculnya kawasan kumuh(Ramdani, 2013). Rumah-rumah di daerah kumuh seringkali dibanguan dengan buruk dan sebagian besar tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak. Lebih dari itu, kondisi ini juga terkadang diperparah dengan adanya marginalisasi atas kelompok masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh dan berpendapatan rendah di perkotaan. Hal ini karena, masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh dianggap sebagai penduduk yang ilegal dan liar. Sehingga warga permukiman kumuh di perkotaan tidak mendapatkan prasarana secara layak dan memadai seperti yang didapatkan warga kelas menengah dan atas, seperti air bersih, listrik dan sanitasi lingkungan.

Menurut Alit (dalam Fitri Yanti, 2019), slogan "*Tapis Berseri*" (*Tertib, Aman, Patuh, Iman, Sejahtera, Bersih, Sehat, Rapih, dan Indah*) mewakili visi dengan kode moral yang kuat. Namun di bagian bawahnya masih terdapat gambar kota Bandar Lampung yang indah dan terawat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tidak terpengaruh oleh berbagai kekurangan dan kelemahan guna merusak kualitas lapisan mikroba lingkungan. Masalah lingkungan apapun, seperti pencemaran, kondisi sosial, kemerosotan ekonomi budaya, dan pola perkembangan lingkungan yang menyimpang dari batas-batas tradisionalnya memperburuk kualitas lingkungan dalam skala nasional.

Beberapa kondisi kawasan kumuh yang ada di pesisir kota Bandar Lampung adalah Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan. Kedua lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki karakteristik yang sama dimana masih banyaknya masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh. Kedua lokasi tersebut termasuk dalam wilayah pesisir pantai yang kumuh dan padat penduduk, serta kurang ramah bagi lingkungan, banyak sampah dimana-mana, dan tidak baik bagi kesehatan masyarakat.Pada Kelurahan Kangkung hampir seluruh lingkungan termasuk kedalam pemukiman kumuh, sedangkan untuk di Kelurahan Way Tataan hanya sebagian saja yang termasuk kedalam kategori pemukiman kumuh.

Dalam merespon tantangan tersebut, kemudian memunculkan kebutuhan yang mendesak dan sekaligus tantangan untuk menemukan cara-cara yang cerdas dan strategi pembangunan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kota dituntut agar menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan dan tangguh.Mengingat strategi pembangunan sosial dan politik, efektivitas zonasi kawasan metropolitan harus ditentukan oleh komitmen terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat umum. Green mengatakan bahwa *managementmust be able to identify the changing physical, socio-economic, and political problems accompanying progressive urbanization*. Karena itu, sebuah kota dianggap sebagai lokasi tunggal di mana semua penduduk, apakah mereka penduduk kota atau bukan, dapat berkumpul. Membangun manusia haruslah melalui

pembangunan masyarakat.Pembangunan kota mengacu pada konsep pembangunan yang penekanannya pada elemen "Manusia" (Wirutomo, 2013).

Pada Musrenbang RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan *Grand Design* aglomerasi perkotaan untuk menggerakkan dan memoderatori pembangunan wilayah dan kawasan sekitarnya melalui Konsep Bandar Lampung sebagai Kota Metropolitan.Kota Metropolitan harus mengadopsi perspektif baru di seluruh proses pembangunan. Redistribusi orang diperlukan dalam perencanaan kota metropolitan untuk mencegah kepadatan di pusat kota. Perencanaan pembangunan bukan hanya pendekatan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, melainkan proses partisipatif metodis yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Ini termasuk partisipasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk yang ada di tingkat rumahtangga, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Kewalikotaan, serta dari masing-masing anggota setiap lapisan.

Sudah saatnya, untuk menyiapkan *Grand Design* dalam rangka mengantisipasi kondisi kejenuhan kota akibat daya dukung dan daya tampung yang melebihi kapasitas yang ada serta menerapan teknologi tepat guna dalam pembangunan kota melalui konsep *Smart City* semakin dirasakan,mengakui pentingnya pertumbuhan kota dan menerapkan manajemen kota yang efektif, efisien dan inklusif. Pembangunan *Smart City* bertujuan menciptakan ekosistem kota yang layak dan nyaman dengan memenuhi prinsip-prinsip yang mengedepankan pelayanan, pemberdayaan, dan kenyamanan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi Lampung ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional dan kawasan andalan nasional yang ada di Sumatera.Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung diharapkan tumbuh menjadi Smart City atau kota yang aman sehingga pengelolaan kota menjadi efisien, inklusif, dan efektif.Menurut Laurinda Godjo (2019), Konsep kota pintar atau *Smart City* membawa serta risiko dan peluang untuk permukiman informal atau kumuh. Melalui inovasi teknis, mereka memiliki potensi untuk membuat kawasan

kumuh lebih baik dan tangguh, diamana mereka tidak hanya kota pintar tetapi juga kota inklusif.

Menurut pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya, sebuah kota pintar haruslah dapat menjadi tempat untuk semua, karena selama ini pembangunan kota dibangun berbasis paradigma yang merusak dengan kapitalisme sebagai pengatur. Oleh karena itu, kota dikatakan sebagai *Smart City* dapat diukur dengan tingkat inklusi mereka, dimana tujuan inklusi membutuhkan strategi ketahanan berkaitan dengan daerah kumuh yang mencerminkan pemahaman ketahanan perkotaan dianggap sebagai kemampuan kota untuk menyerap baik tekanan kronis maupun guncangan akut dan memulihkan fungsinya. Dengan demikian, salah satu cara agar ketahanan dapat dipahami sehubungan dengan daerah kumuh adalah sebagai program pembangunan beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat serta inovasi yang akan dibawa oleh *Smart City*.Khususnya wilayah yang menjadi lokasi penelitian dengan tingkat kekumuhan yang tinggi yaitu, Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **‘‘*SMART CITY*: ETNOGRAFI KAWASAN KUMUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG’’**

I.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kehidupan kemiskinan pada kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan, Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja alasan mereka tinggal dan apa saja perubahan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh di Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan, Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana rekayasa sosial *Smart City* pada kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Way Tataan, Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kehidupan di kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengkaji alasan yang menyebabkan mereka tinggal dan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuhdi Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengkaji rekayasa sosial *Smart City* di kawasan kumuh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program *Smart City* dari sudut pandang sosial budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pembaca terkait teori kemiskinan, sosiologi perkotaan, planologi dan perencanaan kota dan daerah serta dapat dijadikan ssebagai suatu acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan sebagai bahan acuan bagi pemerintah, akademisi, perumus kebijakan, aktivis dan masyarakat umum yang akan melakukan perencanaan dan pengembangan daerah perkotaan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Etnografi

Etnografi adalah bagian terpenting dari penelitian teoretis yang menggunakan metode kuantitatif. Etnografi berasal dari kata *ethno* (bangsa) dan *graphy* (menguraikan). Menurut Frey (dalam Mulyana, 2018),etnografi digunakan untuk menerangi risiko manusia dalam lingkungan alamiah khusus. Biasanya, etnografi digunakan untuk menganalisis sistem kepercayaan tertentu secara menyeluruh, termasuk semua faktor yang terkait dengan sistem kepercayaan tersebut. Etnografi berfokus pada penggambaran suatu kebudayaan tertentu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memahami cara hidup tertentu dari sudut pandang orang luar.

Tujuan etnografi adalah untuk lebih memahami nuansa halus namun signifikan dari kejadian yang yang ingin kita perhatikan. Beberapa makna tersebut di atas dapat diungkapkan dalam kalimat utuh dengan menggunakan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata-kata dan perbuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem makna dasar, ia memiliki tujuan agar orang dapat memahami satu sama lain, lingkungannya, dan hal-hal yang mereka lakukan untuk mencari nafkah. Sistem makna adalah bagian dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah produk dari Etnografi.

Ada banyak jenis penelitian etnografi.Menurut Mulyana (2018) yaitu etnografi konvensional berarti dimana peneliti memasuki suatu kelompok, komunitas, atau subkultur untuk waktu yang singkat.Menurut Hammerley dan Atkinson dalam Mulyana (2018), ciri terpenting etnografi yaitu: Periksa partisipasi ahli etnografi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selama periode waktu yang lama, apa yang terjadi, apa yang dikatakan, dan ajukan pertanyaan jika perlu untuk

mengumpulkan data tentang apa pun yang tersedia untuk menjelaskan topik penelitian.

Donal Carbaugh dan Sally Hastings (dalam Littlejohn & Foss, 2009), mengatakan bahwa untuk menunjukkan bahwa banyak jenis bagian membentuk perumusan teori etiologi. Paragraf pertama menyebutkan orientasi berorientasi tanda hubung yang ada dalam subjek. Setiap individu yang menggunakan etnografi memiliki keyakinan tertentu tentang agamanya dan tujuannya. Misalnya, penulis ingin menekankan betapa pentingnya komunikasi bagi masyarakat secara keseluruhan dan betapa mudahnya menggunakan etnografi dengan fokus pada berbagai aspek yang berhubungan dengan komunikasi.

Bagian selanjutnya adalah pengantar teori etnografi untuk mengidentifikasi jenis penelitian tertentu yang akan dibahas. Secara khusus, peneliti yang menggunakan etnografia ingin memahami berbagai metode yang digunakan oleh populasi sasaran untuk melakukan penyelidikannya. Setelah itu, para peserta melanjutkan diskusi tentang teori-teori budaya yang telah mereka kuasai. Kegiatan-kegiatan tertentu diwujudkan dalam konteks budaya itu sendiri pada bagian ini. Setelah menjabarkan jenis penelitian yang akan dikerjakan, selebihnya mahasiswa akan kembali mempelajari teori-teori fundamental budaya, dengan tujuan menghubungkan teori-teori tersebut dengan peristiwa aktual yang sedang terjadi.

2.2 Teori Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi di mana seseorang kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum yang aman. Ini adalah kondisi tidak termasuk akses ke sumber daya manusia dasar seperti pendidikan, kebebasan kesehatan, dan kesempatan. Demikian pula, orang merasa sendirian, tidak berdaya, tidak berdaya dan kurang beruntung secara sosial dalam rasa sakit psikologis.

Kemiskinan dapat dipahami sebagai aspek status sosial yang tidak setara, hubungan sosial yang tidak adil, mengalami pengucilan sosial, ketergantungan,

dan berkurangnya kapasitas untuk berpartisipasi atau mengembangkan berarti hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Menurut Abdul Syani (2009), kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan seseorang, keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya.

Sedangkan menurut Sen (1999), kemiskinan dipandang sebagai perampasan kemampuan dasar yang memberi seseorang kebebasan untuk memilih kehidupan yang dia miliki untuk dihargai. Kemampuan ini meliputi kesehatan yang baik, pendidikan, jaringan sosial, dan penguasaan atas sumber daya ekonomi dan pengaruh pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemiskinan adalah kurangnya tempat tinggal, ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan masyarakat di mana mereka tinggal baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Terdapat enam dimensi yang menonjol dalam definisi kemiskinan orang miskin. Pertama, kemiskinan terdiri dari banyak dimensi yang saling terkait. Kedua, kemiskinan memiliki dimensi psikologis yang penting, seperti ketidakberdayaan, ketidakberdayaan, ketergantungan, rasa malu dan penghinaan. Ketiga, masyarakat miskin kekurangan akses terhadap infrastruktur dasar-jalan, transportasi, dan air bersih. Keempat, ada kehausan yang meluas akan literasi dan sekolah tidak banyak disebutkan atau mendapat ulasan yang beragam. Kelima, kesehatan dan penyakit yang buruk ditakuti hampir di mana-mana sebagai sumber kemelaratan. Hal ini terkait dengan biaya perawatan kesehatan serta pendapatan yang hilang karena sakit (Deep Narayan, 2000).

Menurut Chambers (dalam Fikriyah (2016), mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integratedconcept* yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*proper*)

Mengatasi kemiskinan, seperti yang ditunjukkan pada pandangan secara serentak, adalah suatu kondisi yang menuntut penggunaan uang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Akan tetapi, dapat berlaku pula pada kelompok yang

telah memiliki pendapatan, meskipun konsep atau pendapat ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*powerless*)

Biasanya, kemampuan untuk mendapatkan uang bergantung pada kekuatan sosial individu atau sekelompok orang, terutama dalam hal menegakkan standar etika untuk mendapatkan uang yang berharga bagi kesejahteraan manusia.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Satu orang atau sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai miskin tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menghadapi situasi yang tidak sedang terjadi dan memerlukan penggunaan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya.Misalnya situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan untuk mencukupinya.

4) Ketergantungan (*dependence*)

Keterbatasan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai orang miskin saat ini menyebabkan tingkat pembalasan yang sangat tinggi terhadap pihak lain. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kemauan dalam mengembangkan solusi atau solusi untuk suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan antisipasi pendapatan baru. Dukungan lembaga lain sangat penting untuk menyelesaikan masalah, khususnya yang menyangkut kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Pengertian keterasingan menurut Chambers adalah faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Biasanya, penduduk yang dikenal sebagai "miskin" tinggal di daerah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan banyak fasilitas ekonomi utama, seperti yang ada di kota besar atau kota kecil, lebih sering dibenci daripada di tempat lain di mana kegiatan ekonomi terkonsentrasi. Masyarakat yang ingin bertemu di daerah terpencil atau

sulit dijangkau dengan fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif rendah memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Definisi kemiskinan Chambers memberikan informasi tentang jenis masalah yang ditemukan di kemisikinan dan faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada munculnya apa yang disebut kondisi memiskinkan. Teori kebutuhan pokok yang sedang dibahas di sini memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kebutuhan pokok yang tidak terbatas hanya pada satu kondisi tertentu dari ketidakmampuan pendapatan.Oleh karena itu, penjelasan kemiskinan yang paling dapat diterima diberikan oleh para ilmuwan sosial yang berusaha menggabungkan dimensi kemiskinan material dan non material.

2.2.1 Bentuk Kemiskinan

Kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, dimana kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:

1) Kemiskinan Absolut

Menurut Giddens (2001), konsep kemiskinan absolut didasarkan pada gagasan subsistensi, kondisi dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan keberadaan yang sehat secara fisik. Hal ini dipandang dapat diterapkan secara universal. Sedangkan Haralambos (2003), menjelaskan bahwa kemiskinan absolut sering disebut sebagai kemiskinan subsisten karena didasarkan pada penilaian.

Kemiskinan absolut ditentukan oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Pokok kebutuhan minimum digambarkan sebagai kebutuhan keuangan dalam bentuk uang. Kebutuhan minimal yang telanjang dikenal sebagai gaya garis kebutuhan "kemiskinan". Penduduk yang berada di sekitar gapura kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan mutlak tetap dan tidak berubah dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut dapat dibandingkan dengan kemiskinan dalam bentuknya yang paling dasar.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakmampuan pengaruh kebijakan pembangunan untuk mendistribusikan pendapatan secara merata di antara seluruh penduduk.Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Sedangkan menurut Giddens (2001), Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang menghubungkan antara kemiskinan dengan standar hidup keseluruhan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Namun, ini menyajikan kompleksitasnya sendiri . Salah satu yang utama adalah kenyataan, seiring dengan perkembangan masyarakat, pemahaman tentang kemiskinan relatif juga harus berubah.

Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Sehingga meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin Karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Sama halnya dengan yang yang dikatakan Haralambos (2003), konsep kemiskinan relatif juga menimbulkan masalah untuk perbandingan orang miskin dalam masyarakat yang sama pada satu waktu dan antar masyarakat. Subyek Kemiskinan karena mereka yang didefinisikan miskin menurut standar hari ini mungkin akan melihat dan merasakan mereka miskin.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan dalam hal ini mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Oscar Lewis pertama kali memperkenalkan konsep kemiskinan budaya ketika ia mengamati bahwa hal itu mungkin berkembang sebagai akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dikandung oleh orang miskin itu sendiri dan masih berlangsung hingga saat ini.Lewis mengidentifikasi kemiskinan kebudayaan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis (Lewis, 1959).

Teori Oscar Lewis tentang *Culture of Poverty* ditampilkan sebagai konsep awal untuk melihat eksistensi budaya kemiskinan di daerah perkotaan. Dimana dalam hal ini, budaya kemiskinan mereka yang hidup di *slum* atau perkampungan kumuh dan memiliki perkerjaan Informal. Memiliki kebudayaan kemiskinan bila tingkat partisipasi mereka rendah, kondisi fisik rumah rusak, usia kanak-kanak singkat, dan tingginya perasaan tidak berharga. Lewis memahami budaya kemiskinan sebagai suatu sub-kebudayaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Perilaku yang mencirikan budaya kemiskinan ini dijalankan secara turun-temurun antar generasi, sehingga menghambat suatu kelompok dalam mayarakat tertentu untuk keluar dari garis kemiskinan(Parsudi, 1993).

Menurut Lewis dalam Suparlan (1993), istilah "kemiskinan" tidak hanya merujuk pada produksi dan distribusi barang dan jasa dalam skala kecil oleh individu yang salah informasi; melainkan juga merujuk pada kegagalan mengenali fenomena ini pada tataran makro, khususnya dalam konteks "kerangka teori ketergantungan antarnegara" dan sebagai penyusun kelas. Lewis melihat kemisikinan sebagai pandangan hidup atau cara melakukan sesuatu, dan unit mikro yang mewujudkannya adalah keluarga karena dipandang sebagai unit sosial terkecil dan pendukung sosial dari kemisikinan.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Menurut Bentuk Jarnasy (2004), kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut kerangka teori fungsional struktural, populasi umum adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan; jika salah satu bagian ini bermasalah atau berhenti berfungsi sebagaimana mestinya, seluruh struktur akan terkena dampak negatif. Empat konsep dasar alam semesta adalah jamur, disfungus, manifestasi jamur, dan keseimbangan (Bernard Raho, 2007).

Menurut teori ini, masyarakat adalah sistem sosial yang terorganisasi di sekitar individu kunci atau wilayah yang selalu terhubung dan aktif dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada bagian pertama juga akan mempengaruhi bagian tas lainnya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial berfungsi secara berbeda dari struktur lainnya. Jika tidak berfungsi, struktur tidak akan ada atau akan rusak dengan sendirinya (George Ritzer, 1985).

Menurut Parsons dalam Ellya Rosana (2019), mengemukakan asumsi mengenai struktural fungsional sebagai berikut :

a. Bagian-bagian dari sistem tertentu sangat tidak stabil dan memiliki perumpamaan yang tidak dapat diandalkan.
b. Aturan dari sistem apa pun adalah aturan yang kaku dan pantang menyerah.
c. Proses perkembangan sistem yang tidak dapat diandalkan dan tidak menentu.
d. Setiap komponen individu dari sistem tertentu dipengaruhi oleh bagian yang berbeda.
e. Batas-batas yang berkaitan dengan linguininya seringkali dibunuh oleh suatu sistem tertentu.
f. Alokasi dan itegrasi adalah dua proses penting yang diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem.
g. Sistem cenderung mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari luar, mengendalikan keseimbangan diri dan memelihara hubungan antarbagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda.

Teori fungsional struktural organisasi mengakui perubahan sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan seringkali mencerminkan kehendak kolektif rakyat. Prosedur pengacauannya masih berlaku ketika

perubahan yang relevan diintegrasikan ke dalam sistem secara keseluruhan. Perubahan yang tidak dapat disangkal berguna (fungsional) dan perubahan lain yang tidak dapat disangkal tidak berguna (disfungsional) keduanya diungkapkan (Ellya Rosana 2019).

Masyarakat dipandang sebagai satu sistem, dengan setiap komponen sistem memiliki fungsi yang unik dan sangat menguntungkan. Teori ini jelas merupakan kemustahilan sebagai respon atas disfungsi ekonomi. Industrialisasi telah merusak sistem ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh sistem di mana orang tertentu diberi penghargaan dan orang lain dihukum.

2.2.2 Jenis Kemiskinan

Kemudian setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah diartikan sebagai kemiskinan yang semakin rusak akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimal atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), serta keadaan tanah yang agak pinggiran. Secara garis besar, daerah-daerah dengan ciri-ciri tersebut di atas adalah daerah-daerah yang belum terkena kebijakan pembangunan, sehingga merupakan daerah-daerah transisi.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah masalah yang disebabkan oleh sistem modernisasi atau praktik bangunan yang menyebabkan masyarakat umum kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan infrastruktur ekonomi. Kemiskinan seperti ini merupakan produk sampingan negatif dari proyek developmentalisme yang sering dilakukan di negara-negara berkembang. Sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi Sasaran mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan karena mereka yang bekerja di sektor pertanian misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan.

2.3 Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah fenomena perkotaan dan semakin meningkat dari hari ke hari dan menjadi masalah perkotaan itu adalah hasil dari sistem pembangunan berorientasi kota di negara berkembang. Dalam proses pembangunan perkotaan, masyarakat pedesaan secara masal telah bermigrasi dari sektor pedesaan di mana orang menderita karena tidak adanya tingkat kesempatan minimum.

Menurut Clinard (dalam Alfiani, 2016), Permukiman kumuh atau liar dikenal sebagai permukiman informal dan tidak terorganisir dengan tidak memenuhi persyaratan minimum fisik (perumahan, ruang terbuka, saluran air, jalan, sanitasi, dll) dan sosial (melek huruf, kesehatan, partisipasi, organisasi, dll). Permukiman kumuh melibatkan lebih dari sekadar elemen perumahan yang tidak memadai, tetapi juga dicirikan sebagai perumahan dengan fasilitas sanitasi yang tidak higienis dan kepadatan penduduk.

Menurut Komarudin (1997) pemukiman kumuh dapat definisikan sebagai suatu lingkungan yang berpenghuni padat (500 orang per Ha) dengan kondisi sosial masyarakat yang rendah, jumlah rumah sangat padat tidak memenuhi dan ukuranya dibawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis serta kesehatan hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undang yang berlaku.

2.3.1 Faktor Terbentuknya Pemukiman Kumuh

Menurut Hari Srinivas (2003), timbulnya kawasan kumuh dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Faktor Internal: budaya, agama, tempat bekerja, tempat lahir, lama tinggal, investasi rumah dan jenis bangunan rumah.
2. Faktor Internal: kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah.

Menurut Komarudin (1997), penyebab utama tumbuhnya kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

a. Urbanisasi dan migrasi merupakan masalah serius, terutama bagi masyarakat miskin.

b. Sulit mencari pekerjaan.
c. Susah menyewa atau cicil rumah.
d. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sangat tepat waktu.
e. Pembersihan lingkungan yang hanya diketahui oleh pemilik rumah.
f. Disiplin desa yang kaku.
g. Kota sebagai pusat perdagangan yang menguntungkan bagi para pebisnis.
h. Harga lahan kasino dan tanah semakin melambung.

2.3.2 Masalah Akibat Pemukiman Kumuh

Pada dasarnya, kawasan yang kumuh tentu akan berdampak pada aspek, di luar negeri atau di luar negeri nasional. Secara umum, dampak yang timbul dari keberadaan kawasan kumuh berdampak negatif terhadap umat manusia, ras manusia, dan sosial ekonomi. Masing-masing aspek ini akan memiliki hubungan satu sama lain dan tidak diluncurkan dalam ruang hampa, menurut dokumen yang menguraikan konstruksi perkotaan.

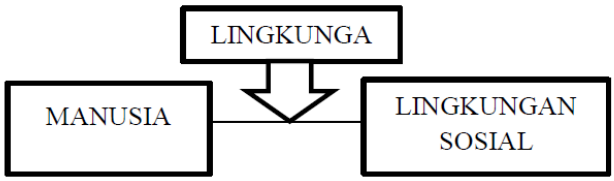

Gambar 2.1
Dampak Adanya Permukiman Kumuh

Dilihat dari segi lingkungan, kawasan perkotaan seperti ini akan semakin memburuk sebagai faktor penurunan kualitas lingkungan, khususnya banjir dan kebakaran. Disebabkan oleh adanya konstruksi yang sangat berkualitas, lokasi bekas penyimpanan barang-barang, dan peruntukan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai area pengambilan udara hujan. Penurunan kualitas lingkungan akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat secara umum, khususnya di wilayah penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya lebih memikirkan pergerakan ekonomi keluarganya dibandingkan dengan aspek kesehatan lingkungan, meskipun tetap akan terlihat fenomena pusat ekonomi sosial. Dampak kawasan kumuh dari

keempat aspek tersebut di atas akan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan antisipasi pembangunan perkotaan di masa mendatang. Karena peran kota sebagai pusat acara, setiap orang yang hadir akan mendapat manfaat dari kesan pencipta kota dan perputaran roda kehidupan.

Sebagai akibat dari pergeseran urbanisasi ke arah kehidupan yang lebih modern karena banyaknya agama luar, kekerabatan di antara penduduk menjadi lebih jelas, terutama di kalangan perempuan yang seringkali tidak menghormati mereka yang lebih senior, dan penduduk yang secara sosial konservatif seperti keseluruhan telah berubah menjadi komersial (Mirna, 2019).

Menurut Dewi Ayu (2017), pemukiman kumuh dapat mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya yaitu dampak sosial dimana sebagian masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah kebawah di anggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidak patuhan terhadap norma-norma sosial.

Selain itu, masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh ini, khususnya dikota-kota besar diantaranya wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, planologi penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Disisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh dibawah garis kemiskinan.

Menurut Susanto (dalam Novitasari, 2010),secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Rancangan bangunan cukup presisi, namun tidak memenuhi standar kualitas bangunan yang tinggi.
2. Satu rumah lain akan menyebabkan kebakaran di komunitas pembunuh.
3. Jalan Sarana bergelombang dan tidak bergerak.
4. Jaringan drainase tidak selalu ada.
5. Kurangnya Suplai Bersih Air
6. Semrawut listrik jaringan

7. Fasilitas MCK yang tidak beroperasi.

2.3.3 Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh

Kemiskinan adalah penyebab utama pemukiman kumuh yang akan datang di daerah perkotaan. Menurut teori ini, kemiskinan dapat menjadi tanggulangi dengan adanya ekonomi yang berkembang dan kenaikan harga, kemajuan standar tenaga kerja dan upah kelompok miskin, serta kemajuan lembaga penanggulangan kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan peningkatan kebersihan udara, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman ataupun usaha perbaikan perumahan dan lingkungan pemukiman pada umumnya.

Cities Alliance sebagailembaga internasional yang menangani hibah, pengetahuan, dan advokasi untuk meningkatkan kepentingan peningkatan kehancuran di dunia.Menurut Lana Winayanti (2004),ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah pertumbuhan permukiman kumuh baru yaitu:

1. Kepastian bermukim (*Secure Tenure*)

Izin seseorang atau kelompok untuk menggunakan segala jenis tanah adalah "hak atas tanah" mereka. Hak atas tanah dapat berupa hak sewa atau hak milik. Keyakinan akan masa depan rasa aman dari kejelasan hak atas tanah memberikan kejelasan hak (sewa ataupun milik) akan membantu meningkatkan stabilitas jangka panjang dan mengakibatkan penghuni berkeinginan berinvestasi untuk peningkatan kualitas Perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat umum di bawah kendali ketat dapat meningkatkan standar masyarakat. Harus ada jargon terkait pekerjaan yang jelas tentang kepastian bermukim. Masyarakat Permukiman Kumur Berkali Menghadapi Berbagi Hambatan Untuk Memiliki atau Memperoleh Kejelasan Hak Atas Tanah dan Hak Atas Hunian Yang Layak. Secara umum, pasar tanah tidak terlalu berfungsi, dan undang-undang yang ada mendorong pemerintah daerah untuk mencari tanah yang berlokasi strategis untuk orang yang mempraktikkan pemukiman kumuh yang baik dan yang terjangkau. Tanah

gendalian sering dikaitkan dengan politik dan korupsi, sehingga penting untuk mempelajari asal-usul, kemilikan, gendalian, penggunaan, dan distribusinya.

2. Mendapatkan hak segabai warga kota

Masyarakat yang tinggal di perkotaan yang kumuh dianggap sebagai anggota komunitas perkotaan dan karena itu harus memiliki komitmen yang sama terhadap kesejahteraan dan keamanan kota. Sebagai bagian dari penegakan dasar pelayanan yang berlaku saat ini, pemerintah kerap menggugat hak tersebut. Proses untuk mengaktualisasikan hak seseorang untuk terlibat dalam bisnis resmi tergantung pada kapasitas orang tersebut untuk melakukannya. Langkah pertama adalah membangun "ruang" di mana anggota komunitas kumuh kumuh dan pemerintah dapat berbicara secara terbuka tentang cara memperkuat komunitas kumuh kumuh. Masing-masing pihak dapat menyampaikan keprihatinan dan mengungkapkan keinginannya melalui dialog, serta membuat program untuk meningkatkan daya tanggap kumuh terhadap kebutuhan masyarakat umum. Jika masyarakat dan pemerintah tidak memahami proses ini, program akan gagal total.

2.4 Smart City

Versi pertama *Smart City* pertama kali digunakan pada tahun 1990. Saat ini, fokusnya adalah pada integrasi kritis teknologi baru dengan infrastruktur perkotaan kontemporer.Institut Komunitas Cerdas California adalah salah satu yang pertama berfokus pada bagaimana masyarakat bisa menjadi cerdas dan bagaimana sebuah kota dapat dirancang untuk menerapkan teknologi informasi (Alawadhi, 2012). Banyak definisi tentang *Smart City*, yang mana label *Smart City* merupakan konsep yang masih kabur dan digunakan dengan cara yang tidak selalu konsisten. Tidak ada satu *template* untuk membingkai kota pintar, atau definisi satu ukuran untuk semua (O'Grady dan O'Hare, 2012).

Ada dua pandangan atau ide utama tentang *Smart City*, yang pertama yaitu *Smart City* adalah kota yang inovatif dan menggunakan paradigma pemikiran baru dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan ekonomi. Dalam hal ini, *Smart City* mengacu pada ekosistem inovasi dimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan antara warga dan pemerintah, untuk memungkinkan inovasi sosial dan untuk meningkatkan

kualitas hidup. *Smart City* adalah kota dimana warganya berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemberian layanan, merancang komunitas mereka, dan bersama-sama menciptakan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kedua, *Smart City* adalah semua tentang jaringan sensor, perangkat pintar, data *real-time*, dan integrasi TIK disetiap aspek kehidupan masyrakat perkotaan. Dalam hal ini, *Smart City* mengacu pada kota yang padat teknologi dimana *Internet of Things* (IoT), robot, kendaraan otonom, dan *drone* memainkan peran penting dalam memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada warga. *Smart City* adalah kota dimana meter pintar dan sistem hemat energi mengelola bangunan, analitik kognitif, dan pembelajaran mesin algoritma mengelola berbagai moda transportasi,dan robot serta *drone* mengelola aset infrastruktur.

Menurut ICLEI, *Smart City* adalah kota yang siap menyediakan kondisi bagi masyarakat yang sehat dan bahagia di bawah kondisi menantang yang dibawa oleh tren global, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sedangkan Giffinger (2007), mendefinisikan *Smart City*yang menjaga dan mengintegrasikan kondisi semua infrastruktur penting, seperti jalan raya, jembatan, terowongan, rel, kereta di tepi laut, bandara, pelabuhan di tepi laut, sistem pengatur lalu lintas udara, bahkan mayor bangunan kota, Smart City mampu memaksimalkan produktivitas sehari-hari sekaligus menerapkan tindakan preventif, meningkatkan standar keselamatan, dan memaksimalkan bantuan kepada pihak yang bertikai.

Menurut Harrison (2010), menyatakan bahwa istilah *Smart City* menunjukkan kota yang terinstrumentasi, saling berhubungan dan cerdas. "Instrumentasi" mengacu pada kemampuan menangkap dan mengintegrasikan data dunia nyata langsung melalui penggunaan sensor, meter, peralatan, perangkat pribadi, dan sensor serupa lainnya. “Tersambung” berarti integrasi data ini ke dalam platform komputasi yang memungkinkan komunikasi informasi tersebut di antara berbagai layanan kota. "Cerdas" mengacu pada penyertaan layanan analitik, pemodelan, pengoptimalan, dan visualisasi yang kompleks untuk membuat keputusan operasional yang lebih baik.

Di bidang perencanaan kota, ideologi *Smart City* sering digunakan sebagai konsep yang lebih kompleks dengan kedalaman strategis. Pemerintah dan lembaga publik di semua tingkatan menghadirkan gagasan kecerdasan untuk mengadakan kebijakan dan program mereka untuk menargetkan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya,(Ballas, 2013).

Dari beberapa definisi dan makna berbeda yang diberikan pada konsep *Smart City*, dapat disimpulkan bahwa konsep *Smart City* tidak lagi terbatas pada difusi TIK, tetapi melihat kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, *Smart City*akan memanfaatkan kemampuan teknologi komunikasi dan sensor yang disematkan ke dalam infrastruktur kota menciptakan kota yang berkelanjutan, hijau, kompetitif dan inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Menjadikan *Smart City* berarti memanfaatkan semua teknologi dan sumber daya yang tersedia secara cerdas dan terkoordinasi untuk mengembangkan pusat-pusat kota yang terintegrasi, layak huni, dan berkelanjutan. Sebuah kota dikatakan cerdas ketika investasi dalam modal manusia dan sosial serta infrastruktur komunikasi tradisional dan modern mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata kelola yang partisipatif. Oleh karena itu, sebagai bagian dari proses membangun perkotaan, *Smart City* juga harus memiliki fokus yang kuat pada norma sosial dan kolaborasi.

2.4.1 Indikator *Smart City*

Menurut Nukma (2015) adapun indikator yang mendukung terciptanya kota yang smart, *Smart City and Society Innovation Centre* dari Institut Teknologi Bandung mendefinisikan kota cerdas atas 6 komponen yaitu :

1. Infrastruktur keras, meliputi lahan dan bangunan, utilitas transportasi dan jaringan, dan TIK.
2. Sistem Kota, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendirikan kota: pemerintahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, energi, keamanan, lingkun gan, sosial, moneter, dan peradilan.

3. Infrastruktur lunak terdiri dari orang dan institusi seperti kepemimpinan, tata kelola, dan forum inovasi yang melengkapi infrastruktur fisik, aturan, dan kesejahteraan sosial.
4. Ekosistem, termasuk ekosistem publik, ekosistem usaha swasta, ekosistem komunitas, dan ekosistem pihak keempat.
5. Pemangku Kepentingan: individu atau organisasi yang memiliki andil dalam hasil perselisihan tertentu yang sedang berlangsung di masyarakat.
6. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Cerdas.

Sementara Adiar Ersti Mardisiwi dalam festagama 2015, PWK-UGM berjudul 'Mari Mengenal Konsep *Smart City'* membagi *Smart City* kedalam 6 indikator utama yaitu:

1. *Smart People* :berartiPenghuni smart city tidak hanya fokus pada kualifikasi pendidikan masing-masing individu tetapi juga pada peningkatan kualitas interaksi sosial. Konstruksi selalu membutuhkan uang, baik itu finansial, manusia, atau sosial.

2. *Smart Environment* : salah satu karakteristik kunci dari *smart city* adalah bagaimana ia menekankan adopsi teknologi dan bagaimana ia digunakan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan setempat, baik di malam hari maupun di siang hari.

3. *Smart Living*: beberapa indikator di bawah ini pada suatu kota antara lain aksesibilitas, persampahan, energi, keanekaragaman hayati, udara, teknologi, dan transportasi. Ini menunjukkan perasaan menyenangkan yang mungkin dialami masyarakat umum. Ketika kami mengatakan bahwa orang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi, yang kami maksud adalah (budaya). Kualitas hidup seperti itu jelas berbeda, dan protagonis selalu berusaha untuk memperbaiki diri.

4. *Smart Mobility* :Ini adalah kapasitas kota untuk menyediakan akses yang aman baik secara lokal maupun internasional. Mobilitas pintar mencakup pembangunan transportasi dan infrastruktur yang dikelola melalui sistem perencanaan infrastruktur kota. Dengan bersinerginya komponen-komponen tersebut maka kualitas hidup masyarakat akan meningkat, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi dan rasa aman masyarakat.

5. *Smart Economy* :dalam kehidupan kota mengacu pada industri yang cerdas, yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam produksi dan distribusi barang seperti barang dan jasa. Dalam istilah "smart economy", sebuah kota harus diunggulkan dengan program pembangunan ekonomi yang efektif dan mampu meningkat setiap tahunnya. Perekonomian secara keseluruhan dapat berjalan dengan sukses jika pemerintah daerah berinvestasi dalam infrastruktur berkualitas tinggi dan memeliharanya dari tindakan perusakan acak.

6. *Smart Governance* (pemberdayaan dan partisipasi) :berkaitan dengan politik rakyat dan partai politik, serta teknologi komunikasi baru seperti e-government dan e-demokrasi. Komponen utama pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang baik. Ini adalah paradigma, sistem, dan proses yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan bangunan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, humanisme, keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas sementara juga berkomitmen pada prinsip-prinsip desentralisasi operasi sehari-hari, tergesa-gesa penilaian, dan pemerintah yang kuat dan berkomitmen.

2.4.2 Unsur dan Faktor-Faktor *Smart City*

Menurut Nukma (2015)*smart city*saat ini berfokus pada teknologi digital apa pun yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Akibatnya, kota pintar memiliki karakteristik dan faktor pendukung tertentu yang menjadikannya kasus khusus kota pintar.

Adapun unsur-unsur *smart city* menurut Nukma (2015)adalah :

1. Teknologi dan sumberdaya (alam, manusia, buatan).
2. Efisien dan efektif.
3. Pintar.
4. Jaringan.
5. Berkelanjutan, kompetitif dan partisipasi.

Adapun adanya faktor *smart city* menurut Nukma (2016) meliputi :

1.Mendorong dan mengembangkan pola struktur kepemimpinan baru

2. Bekerja sama dengan mendukung semua organisasi.

3. Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar

4. Pilih model pembiayaan yang dapat menjawab tantangan dan peluang ke belakang.
5. Model Pembiayaan.

Menurut Nukma (2015),konsep kota cerdas (*smart city*) seperti berikut :

1. Setiap kota yang bekerja dengan baik dengan berfokus pada ekonomi, masyarakat, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
2. Kota yang menguasai dan mengintegrasikan semua infrastruktur, termasuk jalan raya, jembatan, terowongan, rel kereta api, kereta api, bandara, pelabuhan, udara, listrik, dan ruang bawah tanah. Anda dapat meningkatkan jumlah uang yang Anda miliki dan mengelola pertumbuhannya dengan bersikap realistis. Penduduknya disadarkan akan kegiatan pemeliharaan dan keamanan.
3. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kota, kota pintar dapat terhubung dengan infrastruktur fisik, TI, sosial, dan bisnisnya.
4. Kota pintar menjadikan kota lebih efisien, efektif, dan ramah.
2. Penggunaan komputasi pintar untuk menciptakan kota pintar dan fasilitas terkaitnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, transportasi yang lebih aman, dan komunikasi yang efisien dan terbuka.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu ini sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Chintia Martceli Putri, (2021)	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kota Bandar	Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan dengan

		Lampung Provinsi Lampung	efektif berdasarkan hasil evaluasi pengurangan kumuh di Kota Bandar Lampung dari SK Walikota Nomor 974 tahun 2014, kini sudah mencapai 0% kumuh. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yaitu mengenai yaitu mengenai alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung masyarakat yang kurang memahami dan kurang mens*upport* adanya pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
2.	Fitriani Dwi, (2021)	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh (Studi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Kota Bandar Lampung	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04 Tahun 2017 ini masih belum bisa diterapkan sebaik mungkin sebagaimana mestinya, dengan adanya faktor kendala kendala covid-19 yang

			menjadi kendala lancarnya penerapan tugas oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung seperti kinerja bidang perumahan Dinas Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan September tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak signifikan di sebabkan pengaruh dampak pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini yang berdampak pada *refocusing* anggaran daerah maupun pusat.
3.	Sari, Eka Novita and Yulinto, Yulianto and Prihantika, Ita (2021)	Evaluasi Pelaksanaan *National Slum Upgrading Program* (NSUP) (Studi di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota BandarLampung).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program NSUP dalam menanggulangi kawasan kumuh di Desa Campang Jaya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Terwujudnya penanganan kawasan kumuh dapat memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat Desa Campang Jaya.
4.	Dwi Wahyu Handayani,	Problem Realisasi Kebijakan *Smart City*	Dengan menggunakan

	Syafarudin Syafarudin, Lilih Muflihah (2021)	di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung	konsep *smart city and governance*, artikel ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan *smart governance*, pemerintah Kota Bandar Lampung cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur, yang sepenuhnya melibatkan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan modal sosial, dan tidak berbasis masyarakat. Masalah dan misi negara pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya memberikan kualitas pelayanan administrasi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi masyarakat, serta mengabaikan masalah sosial dan lingkungan. Masalah dengan *smart governance* ini menyebabkan rendahnya kepercayaan publik kepada pemerintah, yang merupakan modal sosial penting dari bekerjanya orang-orang pintar.
5.	Heni Marta Diana Matita Putti,	Dimensi Prioritas Sebagai Arahan Pengembangan Smart	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dari 7 dimensi *Smart*

	Muhammad Irfan Affandi, Lutfi Setianingrum (2020)	City Yang Di Utamakan Di Kota Bandar Lampung	*City* di kota Bandar Lampung memiliki gap dibawah 50% yang artinya mayoritas dimensi *Smart City* di Kota Bandar Lampung cukupbaik dalam kinerja. Sebaliknya, 2 dari 7 dimensi *Smart City* diBandar Lampung memiliki gap diatas 50% bahkan diatas 60% yaitu *Smart Mobility*dan lingkungan cerdas. *Smart Mobility* adalah dimensi dengan level tertinggi kesenjangan sehingga menjadi prioritas pembangunan agar dimensi tidak tertinggal tertinggal dari dimensi *Smart City* lainnya. Jadi perlu ada fokus pengembangan pada dimensi yang tertinggal yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan dan pembuatan rencana induk kota pintar.

Melalui kelima penelitian relevan tersebut peneliti dapat melihat apa saja yang diungkapkan kelima peneliti sebelumnya mengenai *Smart City* dan kawasan kumuh sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan penelitian agar nantinya penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak memiliki kesamaan yang mutlak terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melainkan bertujuan agar dapat memberikan kontribusi, menambah, serta melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada rumusan masalah dan tujuan penelitian serta teori yang digunakan. Penelitian ini mengkaji permasalahan kemiskinan yang dialami masyarakat

pada kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung dan upaya rekayasa sosial yang dilakukan pemerintah kota dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui program *Smart City*. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terkait teori yang dipakai, dimana dalam penelitian ini penulis melihat permasalahan kemiskinan menggunakan sudut pandang atau prespektif sosiologis dengan menggunakan teori-teori sosialdan budaya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju sehingga penelitian ini bisa benar-benar representatif dan objektif. Karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil penyelidikan secara ilmiah untuk menemukan, menggambarkan, dan menyajikan kebenaran. Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Adapun pengertian metode-metode penelitian adalah sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyeleaikan masalah ilmu atau pun praktis.

Menurut Denzin dan Lincoln (1994), menyatakan bahwa studi kualitatif adalah studi yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan mengidentifikasi fenomena yang sedang terjadi dan dilakukan dengan mengikuti jalan yang menerima berbagai metodologi. Erickson (1968) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menyajikan secara faktual kegiatan yang sedang dilakukan dan pengaruh kegiatan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari subjek. Menurut Kirk & Miller (1986), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dari kawasannya atau dari peristilahannya, yang mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan etnografi yang mana peneliti secara langsung ikut menjadi bagian dari masyrakat guna mengumpulkan data untuk mengetahui dan melihat bagaimana kehidupan kemiskinan yang terjadi di kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Dimana, inti dari etnografi adalah upaya untuk memperhatikan makna-makna tindakan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin kita pahami.

Menurut Spradley (1997), etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan kebudayaan. Tujuan utama aktivitas ini adalah memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Dalam penelitian etnografi, seorang peneliti tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat yang ditelitinya. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu etnografi berarti belajar dari masyarakat. Etnografi merupakan pekerjaan mendiskripsikan suatu kebudayaan dan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dengan pertimbangan biaya, tenaga dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah utama (Herdiansyah, 2015). Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan proses pengambilan data. Penulis menetapkan lokasi penelitian di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi waras,Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk betung Timur dan Bappeda Kota Bandar Lampung. Adapun kedua kelurahan tersebut dipilih karena merupakan daerah dengan tingkat kekumuhan yang tinggi di Kota Bandar Lampung.

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan semaksimal mungkin dengan kriteria tertentu. Adapun informandalam penelitian ini terdiri dari delapan orang, yakni empat warga Kelurahan Kangkung dan empat warga Kelurahan Way Tataan.

1. Masyarakatdesa Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras,
2. Masyrakat Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.

Informan dalam penelitian ini diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di kawasan kumuh Kota Bandar Lampung, dipilih secara *purposive*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar penduduk asli yang tinggal di kawasan kumuh, sehingga mereka dapat memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta, informasi, dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dengan responden. Data dasar penelitian terdiri dari contoh-contoh masalah yang dipelajari. Sebaliknya, informasi bekas diambil dari sumber resmi seperti artikel berita, buku, dan laporan pemerintahyang terkait langsung dengan proyek penelitian yang ada.

3.4.2 Sumber Data

Informasi untuk penelitian ini sebagian besar berasal dari "informan", atau orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah yang sedang diselidiki. Responden adalah mereka yang ditanyai pertanyaan dalam wawancara atau percakapan untuk mengumpulkan informasi. Dokumentasi mengacu pada adanya berbagai bentuk informasi yang berkaitan dengan topik dan objek kajian, seperti dokumen tertulis atau ketikan, rekaman video, atau bukti foto.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi partisipasi

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan penulis disini adalah partisipasi (*participant observation*) dimana metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan sehingga penulis harus siap membaur dengan masyarakat. Teknik ini digunakan

untuk mengamati secara langsung dan terfokus pada kehidupan sehari-hari masyrakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras dan Kelurahan Way Tataan, Kecamatan Teluk betung Timur Bandar Lampung

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, dapat dikatakan wawancara merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, seperti bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam, sehingga dari teknik ini didapat dokumentasi dan data yang berkaitan dengan peneliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian adalah langkah penting, apakah menggunakan metode statistik atau non-statistik. Analisis data adalah proses menyesuaikan aliran data dan mengatur informasi yang dikumpulkan ke dalam struktur yang koheren yang memungkinkan penemuan tema dan pengujian hipotesis sesuai dengan rekomendasi data. Dari awal hingga akhir penelitian ini, data dianalisis secara terpadu, baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

1. Reduksi data

Ini memerlukan sintesis informasi yang dikumpulkan melalui catatan lapangan, wawancara, dan tinjauan dokumen. Reduksi data, atau redaksi, adalah sejenis analisis data yang bertujuan untuk menyoroti informasi yang relevan, menghilangkan detail yang tidak relevan, dan sampai pada satu kesimpulan yang bermakna. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dikumpulkan, disortir, dan disusun sebelum disintesa tanpa mengurangi nilai dari data aslinya.

2. Penyajian data

Ini adalah kumpulan data terpadu yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat keputusan. Metode penyajian data ini merangkum kumpulan data sedemikian rupa sehingga mudah dibaca dan dipahami; teks naratif paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kuantitatif.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data dalam penelitian ini bertujuan agar data yang dimasukkan sama dengan data sumber aslinya. Hal ini dilakukan karena data yang diinput harus valid dan terbukti kebenarannya. Di dalam penelitian ini data tidak berasal dari peneliti, melainkan dari hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan semua informan untuk kemudian dapat disimpulkan.

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakuka n dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan kehidupan kemiskinan yang terjadi di dala masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Strategi pengujian integritas data harus disertakan dalam proposal. Evaluasi data meliputi pemeriksaan validitas internal, validitas eksternal, generalisasi, dan konfirmabilitas (obyektifitas). Namun, aspek yang paling penting dari audit adalah memeriksa kredibilitas data. Memeriksa kredibilitas melibatkan kegiatan termasuk membaca secara luas, mempelajari materi baru, menggunakan beberapa sumber informasi, terlibat dalam diskusi kelompok dan

brainstorming, dan memeriksa dan menganalisis contoh-contoh negatif (Sugiyono 2018:212).

1. Triangulasi

Triangulasi data dipahami sebagai integrasi metode dan sumber pengumpulan data yang berbeda. ketika akademisi menggabungkan metode pengumpulan data (triangulasi, verifikasi, dan validasi), informasi yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu, para akademisi menggunakan metode pengumpulan data yang rumit untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Menggunakan triangulasi sumber memungkinkan Anda mengumpulkan data dari beberapa sumber menggunakan metodologi yang sama.

2. Member Chek

Member chek adalah proses verifikasi data yang diberikan oleh peneliti kepada sumbernya untuk menghubungi mereka kembali untuk membahas ketidaksesuaian atau pertanyaan lain tentang keakuratan data, jika peneliti menemukan data dari sumber mereka yang mereka setujui sah dan dapat dipercaya. Jika data tidak disetujui oleh sumber, maka peneliti harus mendiskusikan ketidaksesuaian dengan sumber dan menyesuaikan temuan mereka agar sesuai dengan data sumber. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan selama proses penelitian konsisten dengan data yang akan digunakan untuk menulis laporan, dan laporan dapat ditulis setelah periode pengumpulan data berakhir dan setelah semacam kesimpulan telah tercapai.

IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota dari provinsi Lampung. Sebelumnya ibu kota provinsi Lampung yaitu Tanjung Karang, Teluk Betung. Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang di bagian selatan pulau sumatera dan juga merupakan pertemuan lintas tengah dan lintas timur pulau sumatera. Posisi geografis Kota Bandar Lampung ini sangat menguntungkan karena letaknya yang berada di ujung pulau sumatera yang bertetangga dengan ibukota DKI Jakarta yang merupakan pusat perekonomian negara Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2014, luas wilayah daratan Kota Bandar Lampung yaitu 197,22 km2 yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk adalah 960.695 jiwa. Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung.

Gambar 4.1. Peta Kota Bandar Lampung
Sumber : www.google.co/search, 25 April 2022

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 19.722 ha dengan jumlahpenduduktahun 2015 sebesar 1.251.642 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan dan126kelurahan. Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada 5˄20' sampai dengan5˄30'lintang selatan dan 105˄28' sampai dengan 105˄37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumtera dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai ibukota, provinsi Lampung juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat Lampung. Secara administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung serta Teluk Lampung.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Ketinggian wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0 – 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang.
2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara.
3) Daerah dataran tinggi serta sedikit gelombang terdapat di sekitar TanjungKarang bagian barat yang di pengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok di bagian timur selatan.
4) Teluk Lampung dan pulau kecil bagian selatan.

4.1.1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

1. Visi Kota Bandar Lampung

"Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat"

2. Misi Kota Bandar Lampung

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat seperti meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, dan terjangkau yang di dukung oleh sarana dan prasarana fasilitas yang memadai serta meningkatkan pelayanan mutu agar terus membaik.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat dengan cara membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang cerdas, sehingga dikemudian hari dapat bermanfaat bagi sesama masyarakat.
3. Meningkatan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Menciptakan kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
6. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, serta mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang berjiwa religius.
7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan bersih.

4.1.2. Keadaan Fisik Wilayah Kota Bandar Lampung

Sungai-sungai penting secara hidrologis yang mengalir melalui Kota Bandar Lampung adalah Way Halim, Way Awi, dan Way Simpur dari wilayah Tanjung Karang dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, dan Way Kuala yang semuanya mengalir keluar. wilayah Teluk Betung. Muara sungai berada di bagian barat negara itu, tetapi sumbernya ada di bagian selatan negara itu, di "dataran" pantai. Proporsi tanah yang baru terbentuk terhadap total luas tanah adalah enam puluh persen. Landai sampai 35% miring, sangat miring sampai curam pada angka 4%. Dari segi hidrologi, Kota Bandar Lampung memiliki dua sungai besar—Jalan Kuripan dan Way Kuala—serta dua puluh tiga sungai kecil. Semua sungai tersebut berada di dalam batas wilayah

Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Daerah ini dikenal sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS).

Way Simpur, Way Penengahan, Way Kunyit, dan Way Keteguhan hanyalah sebagian kecil dari sungai-sungai kecil yang mengalir melalui Kota Bandar Lampung dan memiliki debit air yang relatif rendah. Selama musim kemarau, sungai melambat, tetapi selama musim hujan, air mengalir lebih cepat. Pada saat yang sama, kemampuan sungai untuk mengaduk sedimen berkurang akibat kegiatan pembangunan yang mengabaikan batas tepian sungai dan merusak lingkungan perairan.

4.1.3 Keadaan Penduduk Wilayah Kota Bandar Lampung

Pada tahun 2019, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.051.500 jiwa dengan *sex ratio* 101, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 19.633 jiwa/ km2, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 2.609 jiwa/ km2.

Berikut data jumlah penduduk wilayah Kota Bandar Lampung:

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk dan Persentase Kepadatan Penduduk Wilayah Kota Bandar Lampung

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Kepadatan Penduduk Per (KM^2)
1	Teluk Betung Barat	32.002	2.904
2	Teluk Betung Timur	44.727	3.016
3	Teluk Betung Selatan	42.262	11.151

4	Bumi Waras	60.939	16.250
5	Panjang	79.800	5.067
6	Tanjung Karang Timur	39.855	19.633
7	Kedamaian	56.482	6.880
8	Teluk Betung Utara	54.337	12.549
9	Tanjung Karang Pusat	54.906	13.557
10	Enggal	30.164	8.643
	Jumlah	253.910	99.650

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah wilayah Kecamatan Panjang dengan tingkat padat penduduknya berjumlah 5.067 per $KM^{2.}$

4.1.4 Profil Kemiskinan Kota Bandar Lampung

Saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan

pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Dengan semakin banyak dan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk yang kemudian akan menambah beban hidup yang semakin besar pula, sehingga mampu menyebabkan munculnya berbagai permasalahan yang semakin kompleks di segala bidang termasuk dalam bidang social-ekonomi di Kota Bandar Lampung. Dengan banyaknya permasalahan, yang paling menonjol diantaranya adalah yang berhubungan dengan kemiskinan perkotaan yang meliputi kondisi, karakteristik, kebijakan sarana prasarana lingkungan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait.

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase penduduk miskin Tahun 2016-2020:

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Tahun	**Jumlah Penduduk**	**Jumlah Penduduk Miskin**	**Persentase Penduduk Miskin**
2016	997.728	100.540	10,15
2017	1.015.910	100.500	9,94
2018	1.033.803	93.040	9,04
2019	1.051.500	91.240	8,71
2020	1.166.066	93.740	8,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Diagram Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

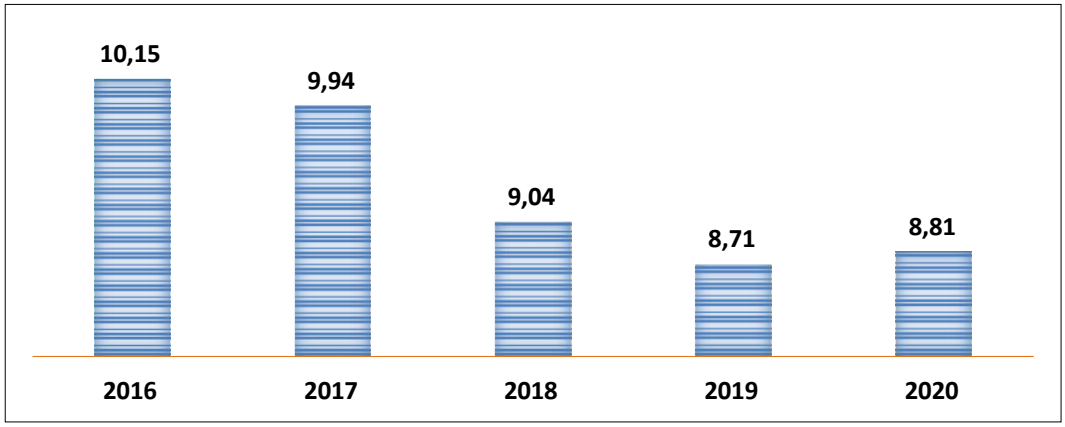

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin cenderung terjadi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berarti terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi jumlah penduduk kategori miskin di Kota Bandar Lampung.

4.1.5 Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Selatan

Teluk Betung Selatan merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan Bandar Lampung dan memiliki luas 1.023 Ha, berbatasan dengan :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panjang.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat.

Kecamatan Teluk Betung Selatan secara administratif dibagi menjadi 11 Kelurahan, yaitu Gedung Pakuan, Talang, Pesawahan, Teluk Betung, Kangkung, Bumi Waras, Pecoh Raya, Sukaraja, Garuntang, Way Lunik, dam Ketapang. Kecamatan Teluk Betung Selatan Merupakan wilayah pantai yang membujur dari timur kearah pantai barat Teluk Lampung.

A. Keadaan Umum Daerah Penelitian

1. Luas dan Letak Daerah

Gambar 4.2. Peta Lokasi Kelurahan Kangkung
Sumber : Google Maps 2022

Kelurahan Kangkung merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Total luas lahan adalah 30,7 hektar. Elevasi normal Kota Kangkung di atas permukaan laut rata-rata adalah 0,50 meter di atas permukaan laut rata-rata. Dari segi jarak, Bandar Lampung berjarak 5 kilometer dari Kelurahan Kangkung dan 3 kilometer dari ibukota Kecamatan. Adapun batas daerah Kelurahan Kangkung yaitu:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Betung.
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Bumi Waras.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Pesawahan.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Kangkung berdasarkan catatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung tahun 2020 berjumlah 44.866 jiwa dengan persentase 51,07%, dimana berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22915 jiwa dan bejenis kelamin perempuan sebanyak 21.951 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 3.100 KK. Dengan demikian angka ketergantungan hidup sebesar 4 orang. Adapun jumlah penduduk Kelurahan Kangkung menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Umum/Khusus	Jumlah (Jiwa)
1	Sarjana	63
2	SLTA	1.992
3	SLTP	2.380
4	SD	2.142
5	TK	505
6	Belum Sekolah	1.023
7	Buta Huruf	56
	Jumlah	8.161

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Tingkat pendidikan orang tertinggi, yang diukur dengan pencapaian pendidikan, ditemukan di antara mereka yang berpendidikan perguruan tinggi minimal tahun pertama (2.380 orang). Meskipun Kelurahan Kangkung merupakan bagian dari Kotamadya Bandar Lampung, populasinya sebesar 12,51% terdiri dari nelayan yang gaya hidupnya kurang menitikberatkan pada pendidikan karena wilayahnya adalah pesisir. Mata pencahariaan penduduk daerah Kelurahan Kangkung sangat beragam hal ini disebabkan daerah Kelurahan Kangkung merupakan daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi.

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Kelurahan Kangkung menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	300
2	Nelayan	1.035
3	Buruh	1.020
4	Lainnya	5.071
	Jumlah	7.426

Sumber: Buku Monografi Kelurahan Kangkung, 2011

Tabel 4.4 Jumlah Pemukiman Kumuh di Kelurahan Kangkung

Kumuh Sedang	
Lk.1	
RT. 03	0,92
Lk.2	
RT.05	3,22
RT.06	0,76
RT.07	0,73
RT.08	0,6
RT.09	0,58
RT.10	0,87
RT.11	1,21
RT.12	0,63
RT.13	0,51
Lk.3	
RT.15	1,94
RT.17	0,41
RT.18	0,76
RT.19	0,58
RT.20	0,61
RT.21	1,55
RT.22	1,52

RT.23	1,7
RT.24	1,72
RT.25	1,82
RT.27	0,52
Kumuh Berat	
RT.16	0,59

Sumber: Slum Improvement Action Kota Plan Bandar Lampung, 2017

Pada tabel di atas menunjukan Kelurahan Kangkung pemukiman kumuh terdapat di 3 Lingkungan dan 22 Rukun Tetangga yang merupakan kawasan kumuh dengan tingkat kekumuhan sedang, sedangkan untuk daerah yang paling kumuh yaitu RT.16 LK.3 dengan tingkat kekumuhan berat.

Kelurahan Way Tataan memiliki penduduk dengan produktivitas sangat banyak. Potensi sumber daya manusia yang terdapat di Kelurahan Way Tataan di bidang pendidikan yaitu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Way Tataan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	TK	313
2	SD	1364
3	SLTP	384
4	SLTA	363
5	SARJANA MUDA	27
6	SARJANA	23
	JUMLAH	2.474

Sumber Data: Profil Kelurahan Way Tataan Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan tertinggi di Kelurahan Way Tataan yaitu pada jenjang SD. Banyak penduduk Way Tataan yang tidak mampu membiayai sekolah anak-anak mereka ke

jenjang selanjutnya. Selain itu, semangat belajar dan menuntut ilmu dari mereka juga kurang yang dikarenakan faktor malas untuk bersekolah.

Kelurahan Way Tataan merupakan wilayah yang letaknya strategis karena berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Oleh karena itu, menjadikan Kelurahan Way Tataan sebagai pusat jasa, perdagangan, dan kegiatan perekonomian. Adapun data mata pencaharian penduduk Kelurahan Way Tataan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Way Tataan Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	PNS	14
2	TNI/Polri	9
3	Wiraswasta/Pedagang	475
4	Nelayan	150
5	Karyawan	113
6	Tukang	86
7	Petani	85
8	Pensiunan	8
9	Jasa	137
10	Pemulung	14
11	Buruh	764
12	Lain-lain	938
	Jumlah	2.793

Sumber Data: Monografi Kelurahan Way Tataan Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan mata uang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Way Tataan adalah buruh. Golongan kedua terdiri dari para pedagang dan pegawai karena banyak sekali masyarakat di kawasan Way Tataan yang menjalankan usahanya sendiri. Adapun jumlah kepala keluarga berjumlah 741 KK pada tahun 2020.

B. Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung

Pertumbuhan penduduk yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah menghasilkan perkembangan wilayah metropolitan. Tren urbanisasi yang kuat telah menyebabkan peningkatan jumlah orang yang tinggal di kota. Salah satu efek langsung dari pertumbuhan populasi adalah permintaan yang lebih tinggi untuk perumahan, yang dipenuhi dengan penurunan pasokan lahan yang cocok. Akibat tingginya permintaan akan tanah, harga real estat perkotaan meningkat, yang berdampak langsung pada harga rumah di sekitar kota. Namun, kemampuan pemerintah dalam menyediakan lahan terbatas, sehingga menyulitkan Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MI) untuk memperoleh properti hunian. Akibatnya, mereka mulai menghuni daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni di pinggiran kota tempat mereka menemukan tempat tinggal yang cocok. Adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1 juta orang atau sebesar 11,57 persen.

Infrastruktur lingkungan yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Harus diakui bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, masalah perkotaan menjadi lebih kompleks, dan tingkat layanan infrastruktur belum cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk secara keseluruhan. Gaya bangunan yang tidak dibatasi dan penyediaan infrastruktur lingkungan yang tidak memadai keduanya berkontribusi terhadap lingkungan alam yang memburuk.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bandar Lampung (2019), mencatat terdapat 18 kelurahan di Kota Bandar Lampung yang paling memprihatinkan semuanya masuk dalam kategori kawasan kumuh. Dari 18 itu, berikut adalah: Kelurahan Bumi Kedamaian; Kelurahan Way Gubak; Kelurahan Way Laga; Kelurahan Ketapang; Kelurahan Campang Raya; Kangkung; Sawah Berebes; Rajabasa Nunyai; Rajabasa Raya; Rajabasa Jaya; Way Dadi Baru; Kaliawi Persada; Pasir Gintung; Kebon Jeruk, Gula Galik, Kelapa Tiga, dan Kaliawi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya karena pembersihan saluran air yang kurang memadai masih sering terjadi saat hujan deras melanda. Selain itu, ada jalan yang kotor

karena masyarakat tidak terdidik untuk mengetahui cara membersihkannya, dan ada sampah karena masyarakat tidak mengetahui cara membuang sampah dengan benar.

Menurut Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung Nomor: 974/IV.32/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung, 26 kelurahan di Kota Bandar Lampung telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh. Dalam konteks ini, Kelurahan Kangkung memiliki luas wilayah terluas, yaitu 21,03 hektar. Dua puluh persen penduduk Bandar Lampung tinggal di Kelurahan Kangkung, di mana permukiman kumuh sangat padat. Selain itu, Kelurahan Kangkung merupakan salah satu kawasan terpadat di seluruh Kota Bandar Lampung, dengan kepadatan penduduk 47.238 jiwa per kilometer persegi. Kota Teluk Lampung yang menjadi lokasi kawasan Kangkung menjadi hub tumbuhnya industri ikan tangkap, baik kecil maupun besar. Tidak mengherankan jika banyak orang memilih untuk membuat rumah mereka di Kelurahan Kangkung, mengingat sumber daya laut yang melimpah di daerah tersebut dan fakta bahwa penduduk setempat dapat memperoleh keuntungan dengan menjual olahan ikan laut dari hasil tangkapan mereka. Waktu terus berjalan dan masyarakat pesisir memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia secara maksimal, menyebabkan penduduk dan ekonomi wilayah tersebut berkembang dan beragam sepanjang waktu. Dengan demikian, kebutuhan infrastruktur yang memadai semakin meningkat, terutama infrastruktur lingkungan dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran).

Keadaan lain dari keterbelakangan lingkungan yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan infrastruktur saat ini gagal memenuhi kebutuhan masyarakat adalah maraknya protes kekerasan. Menurut dokumen Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2020, terdapat banyak indikator untuk menentukan kondisi infrastruktur dasar lingkungan, seperti jalan, air bersih, sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan limbah, dan tindakan pencegahan kebakaran.

Masalah lingkungan nyatanya di wilayah Kelurahan Kangkung telah teridentifikasi, termasuk kondisi perumahan yang tidak memadai (seperti saluran air yang tersumbat), kualitas air minum yang buruk, kurangnya toilet yang berfungsi, dan praktik budaya membuang sampah yang masih ada di laut, yang semuanya memiliki efek negatif pada ekosistem lokal dan telah menyebabkan panggilan untuk dilakukan tindakan. Hal ini karena infrastruktur dasar lingkungan masih belum banyak tersedia di kawasan kumuh perkotaan. Adanya pengaruh masyarakat dalam penyediaan prasarana lingkungan menjadi akar penyebab dari keadaan yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi, R. (2016). Bandar Lampung" KOTAKU" 2020?. Setia Lampung, 1-4. https://hub.beesmart.city/en/smart-city-indicators

DWI, F. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh (Studi pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).Giddens, A. (2001). The global third way debate. Polity Press.

Fikriyah, A. (2016). PERAN ZAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2002-2013 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Handayani, D. W., Syafarudin, S., & Muflihah, L. (2021). Problem Realisasi Kebijakan Smart City di Indonesia: Kasus Kota Bandar Lampung. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *11*(1), 35-62.

Hidayati, D. A. (20170. Sosiologi Perkotaan. Lampung : Moh Nizar.

https://www.urbanet.info/smart-cities-and-slum-resilience/

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/being-smart-about-smart-cities-a-governance-roadmap-for-digital-technologies/http://wkwk.lecture.ub.ac.id/rekayasa-sosial-2/realitas-sosial/

Komaruddin, (1999). Pembangunan Perkotaaan Berwawasan Lingkungan. Dirjen Ciptakarya. Departemen Pekerjaan Umum dan BPPT. Jakarta

Lewis, Oscar. (1993.) “Kebudayaan kemiskinan” dalam Kemiskinan Di Perkotaan dalam Parsudi Suparlan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika

Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikas Dan Ilmu Sosial Lainnya. PT remaja Rosdakarya.

Narayan, D. (2000). Voices of the poor: Can anyone hear us?. World Bank.

Putti, H. M. D. M., & Kewilayahan, J. T. I. D. Dimensi Prioritas Sebagai Arahan Pengembangan Smart City Yang Di Utamakan Di Kota BANDAR Lampung.

Ritzer, G. (2004). Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda.

Rosana, Ellya. (2019) "Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." Al-Adyan: *Jurnal Studi Lintas Agama*, 14.1 : 19-34.

Sari, E. N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2021). Evaluasi Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP)(Studi di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandarlampung). Administrativa: *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(2), 151-162.Sen, G. (1999). Engendering poverty alleviation: Challenges and opportunities

Sen, A., & Dreze, J. (1999). The Amartya Sen and Jean Drèze Omnibus:(comprising) poverty and famines; Hunger and public action; and India: Economic development and social opportunity. OUP Catalogue.

Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

Suparlan, P. (1993). Kebudayaan Kemiskinan dan Kehidupan dalam Masyarakat Luas: Pola Pengorganisasian Kehidupan Golongan Miskinan di Perkotaan. Jakarta: Universitas Indonesia.Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. The world bank research observer.

Sutanudjaja, E., Kusumawijaya, M., Qisthi, M. Z., & Gumilang, I. (2018). STRATEGI UNTUK PENGEMBANGAN KOTA SOSIAL DI INDONESIA.

Syani, A. (2007). Sosiologi skematika, teori, dan terapan. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 18(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3735

Yanti, F. (2019). Pola Komunikasi Kehidupan Sosial Keagamaan Kawasan Kumuh Kampung Pemulung Kota Bandar Lampung. Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi, 3(2), 171-188.